

GAMBARAN DETEKSI *FRAUDULE FINANCIAL REPORT* DAN PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PENYELESAIANNYA

Anne Dahliawati

Universitas Gunadarma, anne@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Penelitian ini bertujuan untuk mengamati diperlukannya urgensi dalam membahas mengenai gambaran deteksi kecurangan laporan keuangan dan peran akuntan publik dalam menyelesaikannya yang mana akan disajikan dalam laporan penelitian berikut. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, untuk mengumpulkan materi dari buku dan internet. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa Fraud merupakan problem yang serius, maka akuntan publik harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian fraudulent financial reporting. Pemahaman atas fraudulent financial reporting di kalangan akuntan publik sangat penting, agar lebih dini bisa dilakukan pencegahan dan pendeteksian terhadap fraud. Fraud juga dapat terjadi adanya kolusi antara akuntan publik dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi akuntan publik dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang (regulator). Fraudulent financial reporting dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja. Menurut SAS No. 99 dan SPAP, akuntan publik (akuntan publik independen) bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam general audit atas laporan keuangan perusahaan.

Kata Kunci: *fraudule, financial reporting, akuntan*

PENDAHULUAN

Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). *Fraudulent financial reporting* merupakan problem yang dapat terjadi di perusahaan mana saja dan kapan saja. *Fraudulent financial reporting* yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (akuntan publik *independen*).

Fraudulent financial reporting di suatu perusahaan merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang

mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan (*financial statement*) tersebut. Oleh karena itu akuntan publik harus bisa mencegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi *fraud*. Untuk mengetahui adanya *fraud*, biasanya ditunjukkan oleh timbulnya gejala-gejala (*symptoms*) berupa *red flag (fraud indicators)*, misalnya perilaku tidak etis manajemen. *Red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi.

Dalam perusahaan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas

manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hal ini berkecenderungan juga dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak secara partial. Sehingga, diperlukannya suatu upaya deteksi dini dalam menganalisa dan menggambarkan kondisi *fraudule financial report* atau lebih dikenal dengan kecurangan dalam laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan adalah tanggung jawab bersama, namun dalam kajian profesi akuntan publik adalah suatu profesi yang harus cepat dan tanggap dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Secara lebih spesifik, yang kemudian tanggap adalah akuntan publik.

Akuntan publik akan melakukan internal auditing, di mana internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit.

Penelitian ini menganalisis perlunya urgensi dalam membahas gambaran deteksi kecurangan laporan keuangan dan peran akuntan publik dalam hal tersebut. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana menganalisa dan mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan dan peran akuntan publik di perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran dan menganalisa dalam pendeteksian kecurangan dalam

laporan keuangan dan meninjau peran akuntan publik di perusahaan. Manfaat teoritis adalah sebagai sumber kajian dan referensi khasanah ilmu pengetahuan atas studi kasus analisa *fraudule financial report* atau kecurangan dalam pelaporan keuangan di perusahaan. Manfaat praktis adalah dapat memberikan gambaran dan solusi teknis, mengenai analisa *fraudule financial report* atau kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat diterapkan di perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, untuk mengumpulkan materi dari buku dan internet. Langkah-langkah yang dipakai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*, yaitu membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan (*financial reporting*), mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah ke *fraudulent financial reporting*, menilai resiko *fraudulent financial reporting* di dalam perusahaan serta mendesain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk *financial reporting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Keberadaan Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan

Kecurangan dalam pelaporan keuangan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah lemahnya manajemen dan koordinasi di perusahaan, serta bagaimana peran internal akuntan publik dalam perusahaan itu sendiri. Internal akuntan publik, sebenarnya telah memiliki tugas dan fungsi yang berupaya mengungkap laporan keuangan dengan transparan dan objektif. Namun, jika internal

akuntan publik saja dirasakan belum cukup untuk mengungkap kesesuaian laporan keuangan, maka akan berbeda dengan peran akuntan publik. Akuntan publik dituntut menjalankan profesinya secara professional dan nilai objektivitas serta independent akan banyak digunakan oleh perusahaan dan investor untuk menggambarkan kesehatan perusahaan.

Untuk lebih berhasilnya peran akuntan publik dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, sebaiknya akuntan publik perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Jika ditinjau secara kepustakaan, maka menurut Ferdian dan Na'im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan dan *fraudulent financial reporting* juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general audit suatu perusahaan.

Tinjauan Sas Dan Analisa Peran Akuntan Publik

Akuntan publik dalam bekerja akan bekerja berdasarkan landasan-landasan yang ada, di mana salah satunya adalah dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan akan mengacu pada *Statements on Auditing*

Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting adalah SAS No. 53 tentang "*The auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities,*" yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan (*error*) dan ketidakberesan (*irregularities*), dan SAS No. 99 "*Consideration of Fraud in a Financial statement Audit*" merupakan revisi dari SAS No. 82 dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. Akuntan publik bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).

Merujuk pada SAS No.99, maka hingga saat ini masih diidentifikasi pengaruh SAS No. 99 terhadap tanggung jawab akuntan publik, antara lain tidak ada perubahan atas tanggung jawab akuntan publik untuk mendeteksi *fraud* atas audit laporan keuangan, tidak ada perubahan atas kewajiban akuntan publik untuk mengkomunikasikan temuan atas *fraud*, terdapat perubahan penting terhadap prosedur audit (*audit procedure*) serta dokumentasi yang harus dilakukan oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan.

Petunjuk yang berlaku saat ini untuk deteksi kecurangan disajikan dalam SAS No. 99, *Consideration of Fraud in a Financial statement Audit* yang berkaitan dengan area keuangan berikut ini, yaitu deskripsi dan karakteristik kecurangan meliputi skeptisisme profesional, diskusi dengan personel, pemerolehan bukti

audit dan informasi, indentifikasi resiko, penilaian resiko yang diidentifikasi, respon terhadap penilaian tersebut, evaluasi bukti audit dan informasi, komunikasi kemungkinan kecurangan dan dokumentasi pertimbangan atas kecurangan.

Tujuan SAS 99 adalah untuk tidak secara langsung menggabungkan pertimbangan akuntan publik mengenai kecurangan ke dalam prose audit sampai selesai. Penilaian resiko kesalahan saji material dalam laporan keuangan meliputi kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.

Respon Dari Kesalahan Saji Dalam Pelaporan Keuangan Dari Akuntan Publik

Dalam beberapa kondisi, akuntan publik dapat menetapkan bahwa prosedur audit yang telah direncanakan saat ini sudah cukup untuk merespon faktor resiko, tapi di sisi lain, akuntan publik dapat memutuskan untuk memperluas audit dan mengubah prosedur yang telah direncanakan. Kadang-kadang akuntan publik dapat berkesimpulan bahwa tidak ada prosedur yang dapat diubah untuk menanganiresiko yang ada sehingga akuntan publik dapat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Ketika akuntan publik telah menetapkan bahwa ada kecurangan tetapi tidak mempengaruhi material pada laporan keuangan, akuntan publik terkait harus merujuk masalah tersebut ke tingkat manajemen yang tepat (paling tidak satu tingkat diatas yang terlibat dalam kecurangan tersebut), memastikan bahwa implikasinya terhadap aspek audit lainnya telah cukup dipertimbangkan.

Bila mempengaruhi material laporan keuangan, maka harus mempertimbangkan implikasinya terhadap aspek audit lainnya, membahas masalah tersebut dengan pihak manajemen senior dengan komite audit dewan komisaris, mencoba untuk menentukan apakah kecurangan tersebut material dan menyarankan klien untuk mengonsultasikan hal tersebut dengan pengacara perusahaan, jika memungkinkan

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang "Tanggung Jawab dan Fungsi Akuntan publik Independen". Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa akuntan publik bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, akuntan publik dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Akuntan publik tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Dalam sudut pandang profesi yang diemban oleh akuntan publik, maka akan merujuk pada bagaimana terdapatnya dua tipe salah saji (*misstatements*) yang relevan dengan tanggung jawab akuntan publik, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh *fraudulent financial reporting* dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset

(*misappropriation of assets*). SAS No. 99 juga menegaskan agar akuntan publik independen memiliki integritas (*integrity*) serta menggunakan kemahiran profesional (*professional skepticism*) melalui penilaian secara kritis (*critical assessment*) terhadap bukti audit (*audit evidence*) yang dikumpulkan.

Peran Profesional Akuntan Publik dalam mendeteksi dan Mencegah Fraud

Profesionalitas akuntan publik dalam mencegah *Fraudule Financial report* adalah melakukan deteksi dini. Salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* yang diakibatkan kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik adalah pengaturan rotasi akuntan publik (akuntan publik). Sesuai Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK.06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003, telah diatur tentang pembatasan dan rotasi terhadap akuntan publik. Pasal 6 ayat 4 Kepmenkeu tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.

Profesi akuntan publik (akuntan publik independen) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu tanggung jawab moral (*moral responsibility*), akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan

jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya dan mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (*objective*) dengan kemahiran profesional (*due professional care*), tanggung jawab profesional (*professional responsibility*), akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahnya (*rule professional conduct*) dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*), akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntan publik melakukan kegiatan-kegiatan menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen dan menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan

keuangan, yaitu analisis vertikal adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan, kemudian analisis horizontal, adalah teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi ilegal lainnya, dan analisis rasio yang merupakan alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut. Dalam melakukan kerjanya mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan maka akuntan publik bisa menggunakan program ACL, di mana langkah pertama-tama adalah akuntan publik harus mengembangkan “profil kecurangan” yang mengidentifikasi berbagai karakteristik data yang diperkirakan akan memiliki skema kecurangan jenis tertentu. Jika profil kecurangan telah dikembangkan, ACL dapat digunakan untuk memproses data perusahaan agar dapat mencari transaksi yang sesuai dengan profil tersebut.

Berikut dibawah ini adalah penjelasan mengenai teknik mendeteksi kecurangan dengan berbagai kondisi.

Pembayaran Ke Pemasok Fiktif

Teknik skema semacam ini mungkin membutuhkan kolusi antara dua atau lebih individu. Profil kecurangan yang mendeskripsikan skema pemasok palsu dan prosedur auditnya dibahas berikut ini:

Nomor Faktur Berurutan

Karena perusahaan korban adalah satu-satunya penerima faktur, maka faktur pendukung yang “dibuat” oleh pemasok palsu tersebut mungkin akan berurutan nomornya. Prosedur audit yang dipakai adalah menggunakan ACL untuk mengurutkan *record* dalam filefaktur berdasarkan nomer faktur dan nomer pemasok. Hasilnya akan memperlihatkan *record* yang memiliki karakteristik berurutan, yang kemudian dapat ditarik perinciannya untuk dikaji lebih jauh.

Pemasok dengan PO Box

Pelaku kecurangan kadang akan menyewa PO Box untuk menerima pembayaran melalui surat. Prosedur audit untuk hal ini adalah : menggunakan *expression builder* ACL untuk membuat filter agar dapat menyeleksi *record* pemasok dari file faktur yang menggunakan alamat PO Box. Dari daftar ini, verifikasi keabsahan pemasok.

Pemasok Dengan Alamat Milik Karyawan

Prosedur auditnya adalah dengan menggunakan ACL untuk menggabungkan file karyawan dengan file faktur menggunakan field alamat sebagai kunci utama bersama untuk kedua file tersebut. Hanya *record* yang

cocok satu sama lain yang dimasukkan ke dalam hasil file gabungan.

Beberapa Perusahaan Dengan Alamat Yang Sama

Gunakan perintah *Duplicates* dari ACL agar dapat membuat daftar alamat surat-menyurat yang sama untuk dua atau lebih pemasok.

Nilai Faktur Sedikit Di Bawah Batas Minimal Yang Akan Dikaji

Banyak perusahaan yang menentukan batas bawah pengeluaran materialitas. Kajian pihak manajemen dan tandatangan dibutuhkan untuk semua cek yang nilainya melebihi batas maksimal tersebut. Dengan pengetahuan ini pelaku kecurangan dapat memalsukan pembayaran yang nilainya sedikit dibawah batas bawah tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dari kecurangan tersebut. Prosedur audit untuk hal ini adalah dengan menggunakan *expression builder create* dari ACL untuk membentuk kisaran nilai di sekitar batas bawah pengendali tersebut. Untuk memperlihatkan aktivitas mencurigakan yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, sortirlah *record* pembayaran yang masuk dalam kisaran ini berdasarkan pemasoknya.

Kecurangan Penggajian

Dua bentuk umum kecurangan penggajian adalah kelebihan pembayaran ke karyawan dan pembayaran untuk karyawan yang tidak ada. Skema yang pertama biasanya melibatkan penggelembungan jumlah jam kerja dan/atau pengeluaran cek gaji duplikat. Pendekatan kedua melibatkan memasukkan karyawan fiktif ke dalam sistem penggajian. Supervisor, yang kemudian menerima cek gaji hasil dari sistem penggajian ini biasanya akan

melakukan jenis kecurangan semacam ini. Variasi dari skema ini adalah tetap memasukkan nama karyawan yang telah keluar dari daftar penggajian. Prosedur audit yang disarankan untuk mendeteksi kecurangan ini dijelaskan sebagai berikut, pengujian jam kerja yang berlebihan dengan menggunakan *expression builder ACL* untuk menyeleksi *record* penggajian yang mencerminkan jam kerja berlebihan. Jika ada cukup banyak waktu lembur yang umum ditemui, maka melakukan filter terhadap *record* jam kerja yang mengungkap yang lebih besar dari 50 jam kerja mungkin akan dapat mengungkap kasus kecurangan, pengujian duplikasi pembayaran dengan menggunakan fungsi *Duplicate* ACL untuk mencari *record* penggajian para karyawan yang memiliki karakteristik berikut ini : Nomer karyawan yang sama, nama yang sama, alamat yang sama dan sebagainya, nama yang sama dengan alamat rumah yang berbeda, nama yang sama dengan nomer rekening yang berbeda, nama yang sama dengan nomer jaminan sosial yang berbeda, alamat surat yang sama dengan nama karyawan yang berbeda. Beberapa *record* duplikasi yang terdeteksi dalam pencarian ini mungkin ditimbulkan oleh fenomena alami (contohnya, orang-orang yang tidak memiliki hubungan tetapi memiliki nama yang sama). Akan tetapi, hasil pencarian ini akan memberikan akuntan publik dasar untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, pengujian karyawan yang tidak ada dengan menggunakan fitur *join* ACL untuk menghubungkan file penggajian dengan file karyawan berdasarkan Nomer Karyawan sebagai atribut umumnya. File gabungan yang dihasilkan seharusnya hanya akan berisi *record* dari file penggajian yang tidak sesuai dengan *record* karyawan yang

valid. Semua *record* ini harus dikaji ulang oleh pihak manajemen.

Gali Lubang Tutup Lubang Dalam Piutang Usaha

Kesederhanaan teknik kecurangan ini adalah kunci keberhasilannya. Satu-satunya bukti dalam kecurangan ini dalam datanya adalah pada perbedaan waktu, antara saat pembayaran diterima dengan datang pembayaran tersebut dicatat. Masalah ini dijelaskan dengan membandingkan dua metode umum untuk mengelola piutang usaha.

Metode Pemindahan Saldo Ke Periode Berikutnya

Gali lubang tutup lubang akan sulit dideteksi dalam sistem ini. Contohnya, asumsikan bahwa pelaku kecurangan menggelapkan pembayaran pelanggan senilai \$500. Jumlah ini tidak akan dicatat kedalam rekening pelanggan tersebut dalam periode sekarang dan saldo yang akan dipindahkan ke periode berikutnya dinyatakan terlalu tinggi sebesar \$500. Dalam periode berikutnya, uang yang diambil dari pelanggan lain akan digunakan untuk menutup sejumlah tersebut. Akan tetapi pelanggan akan mengeluh karena pembayarannya tidak tercatat. Apabila pelaku itu sendiri yang menangani hal tersebut maka ia akan mengatakan bahwa pembayaran terlambat diterima sehingga akan muncul di laporan berikutnya.

Metode Faktur Terbuka

Untuk menggambarkan situasi gali lubang tutup lubang pada metode faktur terbuka ini asumsikan pelanggan A mengirim sebuah cek senilai \$3000 untuk membayar sebuah faktur terbuka dengan jumlah yang sama. Pelaku kecurangan akan mengantongi cek tersebut tanpa mencatatnya pada

periode sekarang. Kemudian pelanggan B membayar \$5000 yang kemudian dipotong sebesar \$3000 untuk membayar pelanggan A yang sudah dikantongi sebelumnya. Sisanya (\$2000) akan dimasukkan dalam faktur pelanggan B yang tetap terbuka. Saldo sebesar \$3000 akan dipindahkan ke dalam periode berikutnya.

Jika akuntan publik mencurigai adanya teknik gali lubang tutup lubang, maka akuntan publik tersebut dapat menggunakan uji ACL berikut ini, yaitu menggunakan *expression builder* ACL untuk memilih penjualan dari tiap versi field dan file jumlah dikirimnya lebih besar dari nol dan kurang dari nilai faktur. Contohnya, barang yang ruak, kelebihan tagihan, dan penolakan kiriman barang yang mengakibatkan si pelanggan hanya melakukan pembayaran sebagian. Gabungan file pindahan yang dihasilkan ke dalam sebuah file yang mencerminkan aktivitas untuk sebuah periode terkait. Menbuat field terhitung untuk nilai yang dipindahkan (nilai faktur – jumlah uang dikirim) dan menggunakan perintah *Duplicates* untuk mencari dalam file tersebut, nilai pindahan yang memiliki nilai yang sama dengan nilai pindahan yang sudah dihitung.

Dalam mendeteksi kecurangan dalam pelaporan keuangan seperti yang diuraikan di atas, umumnya penulis mengidentifikasi bahwa hal tersebut akan terjadi akibat perilaku tidak etis manajemen dan menghilangkan sikap persamaan dalam akuntansi, sehingga terdapat celah dalam membuat kecurangan laporan keuangan. Menurut Wilopo, upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, yaitu mengefektifkan pengendalian internal termasuk penegakan hukum, erbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan good

governance, memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

Penilaian akuntan publik terhadap kecurangan material dapat mempengaruhi audit dalam hal pengaturan staf pelaksana dan keluasan supervisi yang harus sesuai dengan penilaian tingkat resiko audit tersebut, skeptisme profesional yang melibatkan penerapan sikap yang selalu menanyakan dan melakukan penilaian secara kritis terhadap bukti audit, sifat dan waktu serta keluasan prosedur yang dilaksanakan. Berbagai faktor resiko kecurangan yang memiliki implikasi pengendalian, dapat membatasi kemampuan akuntan publik untuk menilai resiko pengendalian di bawah maksimum dan untuk mengurangi pengujian substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa *Fraud* merupakan problem yang serius, maka akuntan publik harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian *fraudulent financial reporting*. Pemahaman atas *fraudulent financial reporting* di kalangan akuntan publik sangat penting, agar lebih dini bisa dilakukan pencegahan dan pendeteksian terhadap *fraud*. Oleh karena itu, IAI perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang *fraudulent financial reporting*. *Fraud* juga dapat terjadi adanya kolusi antara akuntan publik dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi akuntan publik dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang

ketat dari pihak yang berwenang (regulator)

Fraudulent financial reporting dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja. Menurut SAS No. 99 dan SPAP, akuntan publik (akuntan publik independen) bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dalam general audit atas laporan keuangan perusahaan.

Saran

Dalam mengkaji adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dideteksi oleh akuntan publik, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang *fraudulent financial reporting* atau *fraud in financial statement* untuk para akuntan publik agar terdapat pemahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan pencegahan serta pendeteksian secara dini kemungkinan terjadinya *fraud* di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar akuntan publik dapat berhasil mendeteksi adanya *fraud*, sehingga dapat dihindarkan akuntan publik gagal mendeteksi terjadinya *fraud* yang sangat merugikan berbagai pihak.

Jika struktur internal control akibat keberadaan akuntan publik yang telah berperan mendeteksi kecurangan laporan keuangan sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2000). *Fraud Examiners Manual*. Third Edition.
- Albrecht W.Steve and Albrecht Chad O (2002). *Fraud Examination*. Thomson South- Western.
- Alvin A.Arens, Randal J.Elder & Mark S.Beasley. (2003). *Auditing and Assurance Services an Integrated Approach*. International Edition.
- Manning, George A. (1999). *Financial Investigation and Forensic Accounting*. CRC Press Boca Raton New York Washington, D.C
- Hall, James. A., Singleton, Tommie (2007). *Audit dan Assurance Teknologi Informasi*/James A. Hall, Tommie Singleton, edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan Safuddien. (2000). *Membangun GCG pada Perusahaan, dari Bubble Company menuju Sustainable Company*. *Konvensi Nasional Akuntan IV*